

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penerapan konsep *Dynamic Governance* dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Mandailing Natal. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kondisi stagnasi BUMDes yang cukup serius dan memprihatinkan, di mana dari 164 BUMDes yang pernah dibentuk, hanya 90 unit yang beroperasi sesuai regulasi, sementara 155 lainnya dinyatakan tidak aktif atau mengalami mati suri pada tahun 2022. Kondisi stagnasi tersebut dipicu oleh sejumlah faktor struktural dan manajerial, antara lain lemahnya perencanaan dan kajian kelayakan usaha sebelum pendirian BUMDes, rendahnya kapasitas sumber daya manusia pengelola dalam bidang keuangan dan manajemen bisnis, kurangnya monitoring dan evaluasi yang sistematis dari pihak Dinas PMD, serta minimnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan eksternal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, meliputi Kepala Dinas PMD, Kepala Bidang BUMDes, staf teknis pelaksana, serta pengurus BUMDes yang berasal dari tiga desa sampel terpilih. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penguatan *Dynamic Governance* dalam pengembangan BUMDes mencakup tiga pilar utama, yaitu: (1) *Think Ahead*, diwujudkan melalui perencanaan jangka panjang berbasis potensi lokal, sosialisasi kebijakan, dan pelatihan penguatan kapasitas pengelola; (2) *Think Again*, tercermin dalam program evaluasi berkala terhadap kinerja BUMDes, revitalisasi unit yang bermasalah, serta penilaian bulanan yang dilakukan oleh Dinas PMD; dan (3) *Think Across*, terwujud melalui kolaborasi lintas sektor bersama instansi terkait dan rencana strategis pembentukan BUMDes Bersama di tingkat kecamatan. Adapun penyebab utama stagnannya *Dynamic Governance* meliputi lemahnya perencanaan usaha sejak awal pendirian, rendahnya kualitas SDM pengelola, minimnya monitoring dan evaluasi yang terstruktur, serta belum optimalnya keterlibatan pemangku kepentingan eksternal dalam ekosistem pengembangan BUMDes di Kabupaten Mandailing Natal.

Kata Kunci: *Dynamic Governance*, Pengembangan, BUMDes